

**EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TAMAN PINANG INDAH
SIDOARJO**

Rosantika

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
rosantika1234@gmail.com;

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
suprihartono@untag-sby.ac.id;

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didin@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Taman pinang indah sidoarjo. pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di Taman Pinang Indah Sidoarjo. Wawancara dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Hasil dari penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di taman pinang indah sidoarjo masih belum efektif dan efisien. Masih terdapat kekurangan yaitu belum adanya program pemberdayaan yang diberikan kepada PKL. Walaupun dalam upaya penerapan penataan sudah cukup baik, sehingga dapat mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan tersebut.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Penataan, PKL*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how to evaluate the policy on structuring and empowering street vendors in the Taman Pinang Indah Sidoarjo area. the implementation of this research activity was carried out at Taman Pinang Indah Sidoarjo. Interviews and observations are used as data collection methods. The results of implementing policies on structuring and empowering street vendors in Taman Pinang Indah Sidoarjo are still not effective and efficient.. There are still deficiencies, namely the absence of an empowerment program given to street vendors. Even though the effort to implement the arrangement is good enough, so that it can overcome the problem of congestion in the area.

Key words: *Empowerment, Arrangement, PKL*

A. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun di suatu wilayah yang terkena dampak mengakibatkan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini dikarenakan oleh tidak seimbangnya kualitas pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dan kurangnya keterampilan kerja masyarakat. Sehingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran setiap tahunnya. Pada tahun 2022 bulan Februari informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia yang tergolong tinggi, yaitu 8,4 juta orang per Februari 2022. Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen (bps, 2022). Meningkatnya pengangguran dan masih terbatasnya kesempatan kerja oleh pemerintah ditambah dengan masih adanya virus Covid -19 di Indonesia, serta faktor pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat masyarakat berusaha mencari alternatif pekerjaan sebagai solusinya.

Padaحال dalam mencari pekerjaan, pendidikan dan keterampilan sangat diperlukan sebagai persyaratan untuk mendapat pekerjaan. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian khusus diterima di sektor tenaga kerja formal, seperti PNS dan pekerja kantoran, sedangkan mereka yang tertinggal dalam persaingan tidak beruntung mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Mereka memutuskan bekerja sebagai perdagangan sektor informal, honorer, dan pemulung. Pendidikan sangat penting karena dapat meningkatkan kompetensi individu dan kelompok melalui pemberdayaan masyarakat (Tukiman et al., 2018). Dengan daya beli yang tinggi banyak orang beramai-ramai menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Itulah yang bisa dilakukan masyarakat kecil supaya bisa bertahan hidup, salah satunya menjalani pekerjaan sebagai PKL.

PKL adalah orang yang memproduksi dan menawarkan produk untuk memenuhi tuntutan kelompok orang tertentu dengan modal usaha yang relatif sedikit. Pedagang Kaki Lima (PKL) biasanya menggunakan ruang yang tidak layak seperti badan jalan, trotoar, dan depan bangunan tokoh yang tidak secara khusus diperuntukkan sebagai tempat berjualan. Mereka memutuskan berjualan di lokasi tersebut sebab mereka sulit untuk menyewa lokasi yang cocok untuk berjualan karena harga sewa pasar yang tinggi. Dalam masyarakat kita, perdagangan dilakukan secara informal di lokasi-lokasi keramaian. Banyak orang

yang tidak mau menjadi PKL, tetapi karena sangat sulit mencari pekerjaan atau penghasilan saat itu, akhirnya memilih menjadi pedagang kaki lima sebab kurangnya modal usaha sehingga menjadi alasan utama mereka untuk berkerja sebagai PKL

Pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semakin diminati oleh para pelaku usaha kecil karena memiliki peluang penghasilan besar dengan modal yang sedikit, membuat tingginya keberadaan orang yang bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Meningkatnya keberadaan sektor informal akan berdampak pada permasalahan perkotaan.

Salah satunya ialah Kota Sidoarjo yang berpenduduk 1.827.067 jiwa dengan luas wilayah 634,38km². Salah satu Kota yang banyak penduduknya berkerja sebagai Perdagangan Kaki Lima (PKL). Banyaknya tempat wisata dan mal-mal di Sidoarjo menjadi salah satu kota untuk mengadu nasib menjadikan alasan mereka untuk bisa berjualan di kota Sidoarjo. Salah satunya ialah Taman Pinang Indah Sidoarjo yang setiap harinya sering dipadati PKL. Banyaknya pedagang yang menjual dagangannya di pinggir jalan Taman Pinang Indah berdampak pada kemacetan di kawasan tersebut. Salah satu warga ruko TPI, Pak Arifin yang menjabat sebagai ketua RT di Kelurahan Lemah Putro, mengatakan sudah kehabisan akal untuk melarang pedagang kaki lima berjualan. Menurut Arifin, keberadaan PKL di jalanan sangat meresahkan, tidak hanya bagi warga TPI, tapi juga pengendara. Keberadaan PKL selain menimbulkan masalah sampah, juga menjadi sumber kemacetan di sana selama bertahun-tahun.

Permasalahan tersebut menyebabkan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Di Provinsi Jawa Timur setiap kabupaten atau kota kini mempunyai seperangkat kebijakan unik untuk menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan keputusan presiden ini. Termasuk juga Pemerintah kota Sidoarjo membuat suatu Peraturan Bupati Sidoarjo (PERBUP) Tentang pelaksanaan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun dalam implementasinya, Perpres No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tetap harus dipatuhi.

Selama ini, permasalahan PKL di kota belum tertangani dengan baik, melanjutkan pola lama pengusuran yang mengutamakan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kota. PKL biasanya digusur dan dipindahkan ke tempat lain. Bahkan, setelah petugas meninggalkan lokasi, para PKL kembali berjualan. Hal ini karena lokasi PKL yang baru tidak menguntungkan dan tidak potensial. Akibatnya, para PKL memutuskan untuk kembali ke lokasi mereka sebelumnya. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak pernah mengantisipasi atau mengelola pertumbuhan PKL.

Di sisi permasalahan penertiban PKL, sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah lokasi untuk PKL. Hal ini karena pemberdayaan PKL lebih dari sekedar kewenangan, namun ini juga melibatkan pemberian solusi terbaik untuk para PKL, karena pedagang kaki lima tidak hanya berjualan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan juga mencari kekayaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasi dan memberdayakan para PKL. Bentuk pemberdayaan pedagang

kaki lima dengan memberi mereka sedikit modal yang diperlukan untuk memulai bisnis, dan pelatihan- pelatihan keterampilan usaha.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang evaluasi penerapan kebijakan penataan PKL di Kawasan Taman Pinang Indah yang masih belum optimal.

A. TINJAUAN PUSTAKA

Pedagang Kaki Lima (PKL)

PKL ialah pekerjaan bagi masyarakat kecil di sebagian besar kota di negara berkembang. Kontribusi PKL terhadap sektor informal sangat signifikan sehingga sering diikutsertakan dalam diskusi tentang sektor tersebut (Bromley, 1979). Berdasarkan Pasal 1(6) Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban dan Pengakuan PKL yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pengusaha yang menjalankan usaha dagang. Penggunaan barang bergerak atau tidak bergerak Sarana usaha, prasarana kota, fasilitas umum, pemanfaatan sementara/tidak tetap atas tanah dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Thomas R. Dye, 1981). Kebijakan publik ini tidak hanya harus mencerminkan keinginan pemerintah tetapi juga melayani fungsi yang bermanfaat. Pemahaman yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dapat digolongkan sebagai pengambilan keputusan. Mereka memiliki wewenang untuk memutuskan dan mengambil tindakan dalam situasi ini untuk mengatasi masalah sosial.

Evaluasi Kebijakan

Tujuan Evaluasi, menurut Lester dan Stewart (Akbar dan Mohi, 2018:17) ialah untuk menunjukkan dengan tepat berbagai kesalahan kebijakan dan memastikan apakah kebijakan yang dibuat dan diterapkan dapat memberikan efek yang diinginkan. Di sisi lain, William Dunn (Sapulete, 2022) memberikan penjelasan standar penilaian efektivitas kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Efektivitas: Menunjukkan apakah hasil yang diharapkan tercapai
- 2) Efisiensi: Menjelaskan berapa banyak pekerjaan yang digunakan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan.
- 3) Kecukupan: Mendefinisikan sejauh mana dapat mencapai hasil yang diinginkan menyelesaikan masalah
- 4) Pemerataan: Menunjukkan apakah biaya manfaat dibagi secara merata di berbagai kelompok
- 5) Responsif: Kualitas ini menunjukkan apakah hasil kebijakan memenuhi persyaratan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu.
- 6) Ketepatan: Menunjukkan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah Deskriptif kualitatif dan penelitian kualitatif dengan pendekatan ini pada umumnya dianggap sebagai

proses dari pada produk yang diteliti. dipertimbangkan. Tujuan metodologi ini adalah untuk memahami masalah yang dihadapi secara lebih menyeluruh.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang ruang lingkup atau topik dalam penelitian. Fokus penelitian adalah memfokuskan pengamatan penelitian agar pengamatan dan analisis hasil penelitian lebih tepat sasaran. Sebab itu, menggunakan indikator- indikator agar pembahasan sesuai dengan judul penelitian. Oleh karena itu, pokok bahasan penelitian ini pada indikator yang sudah dijelaskan pada teori yang dikemukakan oleh William Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecakupan, Pemerataan, Responsif, Ketepatan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo, Jawa Timur 61213, Indonesia

Sumber Data

Data Primer

Data primer sebagai data utama yang dipakai untuk penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan baik melalui laporan data dari lembaga penelitian maupun wawancara dengan sejumlah informan penting. Hasil wawancara akan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang penelitian yang dilakukan. Adapun informan penelitian ialah antara lain: Koordinator Dinas Koperasi dan UMKN Kota Sidoarjo, Koordinator Pengawas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sidoarjo, dan PKL Taman Pinang Indah Sidoarjo.

Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi tambahan yang dipakai untuk melengkapi data primer yang sudah ada. Informasi ini diperoleh dari publikasi, dokumen hukum, atau situs web yang berkaitan dengan penelitian. Karena informasi penelitian ini didapat dari wawancara dan pemeriksaan materi dari publikasi yang diterbitkan sebelumnya tentang bagaimana evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan para PKL yang ada di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan informasi melalui penyiaran. Pertanyaan langsung kepada responden dari pewawancara (pengumpul data), dan tanggapan dicatat atau direkam dengan alat perekam (Irawan, 2012)

Pengamatan

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi dengan survey langsung ke lapangan yang berisi informasi yang diperoleh peneliti. Pengamatan ini dalam melakukannya untuk mengamati hal-hal lebih dekat yang terjadi dalam proses penataan dan penguasaan kawasan Taman Pinang

Dokumentasi

Dokumentasi ialah sumber data yang diperoleh dari dokumentasi arsip, foto yang didapatkan saat melaksanakan penelitian dilapangan. Dokumentasi ini sangat penting dilakukan karena dari sini peneliti dapat memperoleh data secara fakta yang terjadi dilapangan

Teknik Analisis Data

Muhammad Idrus (2009: 148-152) mengusulkan model analisis data berdasarkan teori analisis data Hurbeman dan Miles, yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga bagian penting, yaitu:

- (1) Reduksi data; Prosedur seleksi yang berkonsentrasi pada reduksi, abstraksi, dan transformasi data yang belum diolah yang dikumpulkan dari catatan kerja lapangan tertulis.
- (2) Penyajian data: Kumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan untuk inferensi dan tindakan selanjutnya disebut sebagai presentasi data.
- (3) Kesimpulan/verifikasi: Penarikan kesimpulan digambarkan sebagai komponen konfigurasi yang menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disusun sesuai dengan karakteristik data

C. PEMBAHASAN

Hasil dari penyajian data dianalisis menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh William Dunn yang terdiri dari beberapa indikator, diantaranya;

Efektivitas

Efektivitas berfokus pada sejauh mana kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL telah diterapkan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan dari implementasi kebijakan, maka efektivitas dilihat dari nilai hasil penerapan kebijakan. Berdasarkan penyajian data bahwa penerapan program penataan dan pemberdayaan PKL Taman Pinang Indah Sidoarjo belum berjalan dengan baik dilihat dari penertiban para PKL masih belum efektif. Walaupun arus lintas di wilayah Taman Pinang sudah mulai lancar dan berkurang kemacetannya. Namun tetap saja masih ada beberapa para PKL yang masih berdagang disepanjang jalan Taman Pinang Indah, yang terkadang membuat beberapa para pengendara berhenti untuk membeli dagangan mereka. Padahal sudah ada larangan dari Satpol PP untuk tidak berdagang dikawasan tersebut pada hari weekday, tetapi beberapa dari para PKL tetap nekat berjualan. Adapun alasan mereka tetap berjualan ialah demi memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupan mereka. Belum adanya program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk para PKL yang ada ditaman pinang indah, serta masih belum adanya fasilitas dapat meningkatkan ekonomi para PKL dan juga belum disediakan tempat yang strategis bagi para PKL untuk direlokasi dari kawasan Taman Pinang Indah. Sehingga membuat para PKL tetap memilih kawasan Taman Pinang Indah sebagai tempat berjualan yang strategis, karena berada dipusat kota. Hal tersebut mengakibatkan keindahan, kerapihan, dan ketertiban dikawasan tersebut masih kurang. Karena masih adanya sisa sampah dari berjualan yang berserakan disepanjang jalan maupun disekitar taman.

Faktor pendorong; Arus lintas dikawasan Taman Pinang Indah mulai lancar dan berkurang kemacetannya, karena adanya petugas Satpol PP yang melakukan pengawasan dan penertiban sehari sekali dikawasan tersebut untuk menertibkan para PKL.

Faktor penghambat; Kurangnya solusi dari pemerintah daerah untuk menangani para PKL yang ada dikawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo, seperti

belum adanya program pemberdayaan, relokasi ke tempat strategis dan juga fasilitas yang menunjang mereka untuk berjualan. Sehingga mengakibatkan beberapa para PKL masih nekat berjualan dilokasi tersebut.

Efisiensi

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya sesedikit mungkin untuk menghasilkan hasil terbaik. Efisiensi berkaitan dengan berapa banyak pekerjaan yang dihabiskan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk sumber daya manusia dalam melakukan penertiban dan pengawasan di Taman Pinang Indah Sidoarjo masih belum efisien. Walaupun petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban dan pengawasan sudah melakukan dengan baik. Namun upaya tersebut tetap saja kurang membuahkan hasil yang maksimal. Terbukti bahwa masih adanya beberapa PKL yang nekat berjualan pada waktu weekday dikawasan taman pinang indah, ketika tidak ada petugas Satpol PP yang berjaga. Hal tersebut dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP hanya sekali sehari pada pukul 08.00-12.00 dan kurangnya personil yang diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban PKL. Dan jika dilihat dari anggaran maupun fasilitas untuk pemberdayaan bagi para PKL di taman pinang indah sidoarjo yang diberikan oleh pemerintah daerah masih belum ada. Sehingga dalam tingkat efisiensi pelaksanaan kebijakan penertiban dan pemberdayaan masih kurang.

Faktor pendorong; sumber daya manusia yaitu petugas Satpol PP yang diperlukan untuk melakukan penertiban dapat menertibkan para PKL pada waktu patrol. Para petugas menindak tegas bagi para PKL yang tetap nekat berjualan disepanjang jalan taman pinang indah ketika weekday.

Faktor penghambat; Kurangnya waktu pengawasan dan kurangnya personil satpol pp yang diterjunkan untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Dan juga masih belum pemberdayaan dan fasilitas yang menunjang para PKL untuk berjualan. Mengakibatkan para PKL yang masih nekat berjualan disepanjang jalan taman pinang indah

Kecukupan

Kecukupan ialah sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dikawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo belum memenuhi kecukupan. Karena jika hanya adanya upaya penataan dari Satpol PP untuk menertibkan para PKL agar kawasan tersebut tertib, bersih dan tidak macet. Dan untuk personil Satpol PP yang diterjunkan untuk melakukan penataan dan penertiban PKL di Taman Pinang Indah Sidoarjo masih kurang untuk dapat menertibkan 341 PKL di kawasan taman pinang indah dan kurangnya waktu pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp. sehingga masih adanya beberapa pkl yang kembali berjualan dilokasi tersebut. Para pedagang juga memerlukan adanya fasilitas seperti disediakanya tempat relokasi yang strategis seperti kawasan Taman Pinang Indah. Demi untuk dapat tetap berjualan dan meningkatkan penghasilan mereka, sehingga mereka tidak nekat berdagang di Taman Pinang Indah. Dan PKL juga memerlukan adanya program pemberdayaan bagi mereka seperti pelatihan keterampilan guna menambah nilai jual. Tetapi jika dilihat dari kondisi jalan Taman Pinang Indah Sidoarjo sekarang sudah mulai lancar tidak

terjadi kemacetan dan sudah cukup kelihatan tertib. Walaupun masih terlihat adanya beberapa pedagang yang tetap berjualan disepanjang jalan jika tidak ada petugas Satpol PP berjaga dan terkadang meninggalkan beberapa bekas sampah jualannya. Hal tersebut membuat kriteria kecukupan dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Dikawasan Taman Pinang Indah belum terpenuhi

Faktor pendorong; Kondisi jalan dikawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo sekarang sudah mulai lancar, karena adanya penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP.

Faktor penghambat; Masih adanya para PKL yang nekat berjualan pada hari weekday dikarenakan masih belum adanya fasilitas tempat yang strategis untuk berjualan seperti kawasan taman pinang indah

Pemerataan

Pemerataan ialah sesuatu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan terhadap masyarakat atau pencapaian tujuan. Apakah penerapan suatu kebijakan atau program berlaku sama untuk semua PKL atau hanya untuk PKL tertentu. Terkait dengan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Taman Pinang Indah Sidoarjo dalam pelaksanaannya cukup merata dalam menerapkan kebijakan untuk tidak berjualan disepanjang jalan Taman Pinang Indah pada waktu weekday disampaikan merata pada para PKL. namun masih ada beberapa PKL yang nekat berjualan dikawasan taman pinang indah pada waktu weekday. Karena masih belum adanya upaya program pemberdayaan dan belum tersedianya fasilitas seperti tempat yang benar-benar strategis untuk mereka berjualan, mengakibatkan mereka tetap nekat berjualan dikawasan tersebut jika tidak ada petugas Satpol PP berjaga demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Faktor pendorong; Dalam melaksanakan penertiban PKL dikawasan taman pinang indah para petugas Satpol PP sudah merata untuk melarang semua PKL yang berjualan dikawasan tersebut untuk tidak berjualan pada waktu weekday demi menjaga lalu lintas agar lancar.

Faktor penghambat; Masih belum adanya tempat yang strategis seperti taman pinang indah dan masih belum adanya program pemberdayaan bagi PKL mengakibatkan beberapa dari mereka masih nekat berjualan dikawasan tersebut

Responsivitas

Responsivitas atau daya tanggap ialah sejauh mana suatu kebijakan memenuhi persyaratan, kepentingan, atau nilai-nilai dari sekumpulan individu tertentu. Kriteria ini sangat penting karena, bahkan jika analisis memenuhi semua persyaratan lain untuk penerapan, efektivitas, dan efisiensi, itu masih akan gagal jika gagal memenuhi tuntutan kebijakan yang sebenarnya. Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di taman pinang indah ini mendapat tanggapan yang beragam. Tanggapan positif oleh masyarakat pengguna jalan taman pinang indah yang telah merasakan dampak positif dari adanya kebijakan ini yaitu lalu lintas dijalan Taman Pinang Indah sudah mulai lancar pada waktu weekday. Karena tidak banyak PKL yang berdagang disepanjang jalan Taman Pinang Indah. Walaupun terkadang terlihat masih adanya 1 sampai 3 PKL yang tidak peduli tentang pelarangan untuk tidak berjualan dikawasan tersebut pada waktu weekday dan tetap nekat berjualan disepanjang jalan. Dari tanggapan PKL mempunyai tanggapan negatif yaitu tetap ingin berjualan sepanjang hari dikawasan taman

pinang indah, walaupun mereka mengerti jika aktivitas jualan mereka dapat mengakibatkan kemacetan di wilayah tersebut. maka dari itu para PKL meminta solusi agar diberikan tempat yang strategis seperti kawasan taman pinang indah untuk berjualan dan juga diberikan program pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan demi meningkatkan jualan mereka.

Faktor pendorong; pengguna jalan Taman Pinang Indah Sidoarjo merasa tidak terganggu dan merasa nyaman karena lalu lintas dikawasan tersebut sudah lancar, karena tidak ada lagi para PKL yang berjualan disepanjang jalan tersebut.

Faktor penghambat; Banyak PKL yang masih mengeluh karena masih belum pemberian program pemberdayaan atau tempat yang strategis untuk dapat meningkatkan penjualan mereka

Ketepatan

Suatu kebijakan yang akhirnya akan menunjukkan apakah tujuan yang ditetapkan konsisten dengan rencana semula atau tidak. Ketepatan dalam hal bagaimana hasil yang diharapkan bisa bermanfaat atau berharga bagi masyarakat. Dalam hal ini merujuk pada implemntasi kebijakan penataan. Apakah dapat mengatasi permasalahan seperti kemacetan yang ada di kawasan Taman Pinang Indah atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketepatan program yang dilaksanakan masih belum berjalan dengan baik walaupun sudah dapat memecahkan masalah yang ada dikawasan tersebut seperti dapat mengurangi kemacetan yang ada dikawasan tersebut. namun dalam hal keindahan dan kerapihan di dalam kawasan tersebut juga masih kurang karena masih adanya sampah –sampah bekas para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan. Namun untuk implementasi program pemberdayaan dalam meingkatkan ekonomi masyarakat atau para pedagang masih belum berjalan dengan baik. Karena tidak adanya program pemberian fasilitas atau tempat strategis untuk mereka dapat berjualan setiap harinya.

Faktor pendorong; Dalam menerapkan penertiban para pedagang membuat lalu lintas dikawasan taman pinang indah sekarang menjadi lancar.

Faktor penghambat; Masih belum adanya fasilitas atau program pelatihan-pelatihan pemberdayaan bagi para pedagang taman pinang indah, membuat beberapa para pedagang masih tetap nekat berjualan dikawasan tersebut. sehingga mengakibatkan masih terlihat beberapa sampah yang berserakan di area taman.

D. KESIMPULAN

Hasil temuan dilapangan yang dijabarkan dalam pembahasan diatas terhadap Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Pinang Indah Sidoarjo belum maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebab dari 6 indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian di lapangan belum semua indikator mencapai tujuan dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL yaitu dengan tujuan menjadikan lingkungan yang tertib, bersih, sehat, rapih dan indah dan juga dapat mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan PKL serta mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya. (perda no 3 tahun 2016)

Dalam indikator efektifitas, efisiensi, kecakupan dan ketepatan belum mencapai tujuan kebijakan, karena dalam penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Taman Pinang Indah Sidoarjo hanya dilakukannya program penataan kepada PKL oleh Satpol PP untuk tidak diperbolehkan berjualan di sepanjang jalan pada waktu weekday agar tidak mengganggu lalu lintas dan kawasan menjadi tertib hasilnya kawasan tersebut sekarang tidak macet lagi dan lalu lintas menjadi lancar. Walaupun masih beberapa PKL yang tetap nekat berjualan. Sehingga kawasan tersebut masih belum terlihat rapih dan bersih karena masih di temui beberapa sampah di area taman bekas sampah jualan para PKL yang tetap nekat berjualan. Dan juga dalam program pemberdayaan seperti fasilitas tempat atau pelatihan-pelatihan keahlian untuk para PKL masih belum diberikan kepada PKL di Taman Pinang Indah. Sehingga belum dapat mengembangkan ekonomi para PKL.

Pada indikator Pemerataan sudah cukup merata karena adanya kelongaran yang diberikan pemerintah kepada semua PKL di Taman Pinang Indah untuk dapat berjualan pada hari minggu. Namun Petugas Satpol PP akan bertindak tegas pada para PKL yang tetap nekad berjualan pada waktu weekday. Hal tersebut di respon baik oleh pengguna jalan maupun warga sekitar agar dapat menciptakan kawasan yang tertib dan bersih. Dan dalam indikator responsivitas adanya respon para PKL terkait penerapan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya setuju, karena para PKL mengharapkan adanya program-program yang dapat meningkatkan penjualan mereka tidak hanya dilakukan penataan para PKL juga butuh fasilitas seperti tempat berjualan yang strategis dan aman. Sehingga dapat tetap berjualan sepanjang hari demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- bps. (2022). *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-89-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Bromley, R. (1979). Introduction – The Urban Informal Sector: Why Is It Worth Discussing? In *The Urban Informal Sector* (Second Edi, Vol. 6, Issue 9). Pergamon Press Ltd. <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-024270-5.50005-3>
- Irawan, S. (2012). *METODE PENELITIAN SOSIAL*. 163. <http://perpustakaan.kemkes.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=10614>
- perda no 3 tahun. (2016). *Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016*. 53(9), 1689–1699.
- Sapulete, R. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA. *γ787, VIII(8.5.2017)*, 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Thomas R. Dye. (1981). *Understanding public policy*. 163. <http://perpustakaan.kemkes.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=10614>
- Tukiman, T., Rosida, R., & Andarini, S. (2018). Pemberdayaan Perempuan

Nelayan Dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(2), 51.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p51-55>